

BAB III

PENDEKATAN PARPOL TERHADAP TKI DI MALAYSIA

Di Malaysia, Parpol mempunyai bermacam-macam pendekatan kepada TKI maupun pemerintah melalui beberapa hal. Bagi parpol memperkuat pengaruh ke seluruh elemen WNI di Malaysia dapat menguntungkan individu mereka sebagai pengurus parpol. Ada beberapa aspek untuk meneliti aktivitas parpol di Malaysia di dalam bab ini; *Pertama* pengaruh birokrasi yang dapat mengubah birokrasi sosial politik hubungan parpol, TKI, pemerintah pusat, parpol di Indonesia dan KBRI; *Kedua* pengaruh parpol secara budaya yang menggunakan pendekatan agama, budaya, hobi, maupun identitas TKI di Malaysia; *Ketiga* pengaruh langsung parpol terhadap TKI yang bersifat transaksional sebelum dan saat pemilu berlangsung; *Keempat* mengklarifikasi kejadian nyata dalam hubungan KBRI dengan parpol; *Kelima* perbedaan parpol Indonesia di dalam negeri dan di Malaysia. ke semua mempunyai konektivitas yang berlangsung hingga saat ini. Tahun politik mendekati pemilu 2019 ini merupakan saat yang tepat untuk membeberkan fenomena yang terjadi di lapangan secara spesifik. Penulis melakukan penelitian ini selama 2 minggu di Malaysia dalam pengambilan data dengan metode wawancara dan observasi .

3.1 Pengaruh Birokrasi Parpol di Malaysia

Di mata TKI, eksistensi parpol dibutuhkan khususnya pendekatan birokrasi parpol kepada TKI melalui KBRI ataupun instrumen hukum yang dapat mengikat mereka dengan parpol. Melalui KBRI tersebut parpol lebih mudah mendapat kepercayaan TKI yang ingin mengurus legalitas dokumen dan perlindungan.

Pengaruh tersebut berupa birokrasi dan pendekatan yang terstruktur dengan lembaga resmi sehingga cenderung mempunyai keterikatan. Dalam hal ini terikatnya aspek kepercayaan karena para TKI dapat memberi jaminan atas hubungannya dengan parpol. Oleh karenanya pengaruh birokrasi dianggap kompeten memiliki tendensi yang lebih baik dari pengaruh lainnya.

Disisi lain pengaruh birokrasi parpol lebih sistematis dilakukan parpol karena indikator yang didapat dari pengaruh itu pada akhirnya menjadi sistem yang dapat membuat keterikatan kepada TKI. Sehingga dengan demikian parpol dapat mengintervensi TKI yang sudah berada didalam pengaruh secara terstruktur. Para elite parpol yang dapat melakukan pengaruh birokrasi biasanya mereka yang mempunyai kedekatan dengan KBRI dan dipercaya oleh KBRI karena terindikasi dari beberapa latar belakang seperti diantaranya kerjasama parpol dengan staff KBRI dan tokoh masyarakat yang dipercayai para TKI di Malaysia.

Melalui pengaruh birokrasi tersebut parpol dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap TKI melihat bahwa penyelesaian masalah serta legalitas dokumen TKI berada dalam wewenang KBRI. Dalam hal ini perlindungan paprol justru membantu jalannya birokrasi KBRI atas permasalahan TKI. Secara birokratis parpol yang memiliki hubungan baik dengan KBRI akan lebih mudah mendapat kepercayaan TKI untuk perlindungan mereka karena tidak semua parpol dapat melakukan pendekatan birokrasi terhadap KBRI. Latar belakang parpol pada pengurus KBRI yang kemudian juga menjadi salah satu penentu pendekatan birokrasi tersebut. Oleh karenanya kepentingan politikus parpol maupun parpol itu sendiri dapat tersalurkan dengan baik apabila birokrasi parpol yang memiliki relasi baik kepada KBRI berjalan lancar.

- **Gerindra**

Para tokoh politik di Malaysia kadang memiliki tempat tinggal atau rumah yang resmi, namun kebanyakan TKI di Malaysia tidak punya rumah kemudian mereka mengandalkan rumah elite politik tersebut sebagai alamat rumah untuk keperluan surat menyurat dan transaksi pengiriman sehingga disaat pemilu surat suara mereka terikat dengan elite politik yang di titipi alamat TKI tersebut (Muis D. B., Wawancara, 2018). Kemudian Dasril menggambarkan kronologi fenomena tersebut:

”Katakanlah orang numpang di alamat saya, katakanlah ada 500 sampe 1000 orang yang gimana? Ini harus ada urusannya ke KPU pusat. Terus saya kasih gambaran lagi, orang yang tinggal di rumah susun, alamat sama cuma beda nomor rumah, sedangkan kotak posnya itu di bawah. Dan bahkan kotak posnya, itu hampir seratus persen semuanya rusak” (Muis D. B., Wawancara, 2018).

Hermanto, Mantan Sekretaris Umum Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Malaysia PERMAI menjelaskan bahwa bantuan dana menjadi instrumen yang berpengaruh dari DPP Demokrat berpengaruh untuk menyumbang jalannya acara yang dilakukan TKI di Malaysia. Dengan demikian parpol dianggap menguntungkan. Setiap TKI membuat even mereka tidak terlalu dibebani dengan kebutuhan dana yang besar dengan melapor kepada parpol pusat mereka dapat bantuan dana (Hermanto, Wawancara, 2018).

- **PKB**

KBRI sekarang ini sudah ada yang mewarnai dari kalangan parpol tertentu, nampak dari latar belakang staf KBRI yang didominasi oleh PKB. Munir, Wakil Ketua DPC LN PKB Malaysia sekaligus pengurus Nahdlatul Ulama NU mengatakan banyak pengurus NU masuk ke PKS, Gerindra dan PKB namun lebih kuat masuk PKB karena dubes dari PKB (Munir, Wawancara, 2018)

Kendali politik PKB relatif aman karena Dubes KBRI dari PKB. Dan tidak bermaksud untuk menyombongkan diri namun Saiful Aiman, Ketua DPC LN PKB Malaysia mengatakan:

“Atase politiknya PKB, konselornya PKB, udah ketauan arahnya. Pak Agus PKB, Bukan, tak menamakan orang PKB...Iya saya bilang kan hatinya”
(Aiman, Wawancara, 2018).

Bahkan muncul statemen yang memperkuat analisis kedekatan khusus PKB dengan KBRI bahwa secara struktur keduanya telah menjalin kerjasama politik untuk memenangkan pemilu dengan klarifikasi kesamaan latarbelakang parpol. Saiful menambahkan bahwa PKB pura-pura sibuk di depan KBRI padahal PKB sudah memiliki tiket di KBRI maka partai lain seperti PDIP marah (Aiman, Wawancara, 2018)

Menjadi PPLN merupakan kedudukan penting dalam pemilu, secara birokratis KBRI yang menjadi PPLN tentu memiliki pengaruh besar dalam pemilu. Pendaftaran untuk jadi PPLN hanya formalitas karena calon PPLN sudah ditentukan oleh KBRI yang merupakan basis PKB sekarang. Dasril mengatakan bahwa yang mengancam dan yang dicurigai Gerindra bukanlah parpol lain, karena dari 7 anggota PPLN dari KBRI pada pemilu 2014 hanya 2 orang namun sekarang

terdapat 5 anggota PPLN dari KBRI walaupun terdapat pendaftaran jadi PPLN itu hanya formalitas (Muis D. B., Wawancara, 2018).

PKB di Malaysia berperan aktif dalam membantu TKI yang membutuhkan perlindungan. Melalui KBRI, PKB menggunakan pengaruhnya untuk membantu TKI yang mempunyai urusan dengan KBRI terlebih dalam pembuatan dokumentasi. Artinya PKB menjadi aktor ketiga yang berkontribusi dalam pelayanan KBRI tersebut. PKB tidak ada halangan untuk berkomunikasi dengan KBRI kebutuhan TKI dalam kasus pemulangan, dokumentasi dan lainnya dapat diusahakan dan selalu dipermudah oleh KBRI menurut ketua DPC LN PKB Malaysia Saiful Aiman (Aiman, Wawancara, 2018). Perlindungan TKI melalui PKB tersebut secara birokratis telah tertata rapi dengan KBRI dalam penyelesaian masalah.

Setelah diketahui bahwa mayoritas staf yang ada di KBRI berlatar belakang PKB maka selanjutnya PPLN yang mengatur jalanya pemilu diisi oleh mayoritas orang KBRI. Tujuannya adalah untuk memudahkan PKB dalam urusan pemilu 2019. Dato' Zainul, ketua DPC LN PPP Malaysia berpendapat bahwa indikasi akan kemenangan PKB di Malaysia terbuka lebar. Zainul mengatakan:

“Tahun 2019 ini kan datanya kan enggak jelas ini jadi selisih makanya di letaklah orang-orang staf KBRI jadi PPLN lha feeling kita indikasinya ke PKB karena duta besarnya kan dewan pembina PKB nah kalau kelewatan kita mau buat grup-grupnya pendukung Jokowi ini mau buat apa namanya surat dukungan Jokowi keberatan untuk menggantikan duta besar dan

rencananya Buas rencananya mau ditarik mau digantikan” (Arifin, Wawancara, 2018).

- **PDIP**

Perlindungan menjadi kebutuhan primer untuk TKI khususnya dalam pembuatan dokumen yang menentukan legal atau ilegalnya status mereka. Dengan demikian TKI yang statusnya ilegal akan mencari perlindungan pada parpol untuk mendapatkan dokumen dari KBRI. TKI yang ilegal tidak dapat mengurus legalitas ke kedutaan apa bila terjadi masalah mereka menghubungi parpol yang dekat dengan KBRI untuk mengatasi masalah tersebut kata Asfar ketua DPC LN PDIP Malaysia (Asfar, Wawancara, 2018).

Pengaruh parpol di Malaysia besar bahkan dapat melindungi TKI dari kepolisian Malaysia. Didukung dengan personal tokoh politik yang dapat mengalokasikan penyelesaian masalah TKI dengan Polisi Malaysia. Figo ketua SERANTAU yang menjelaskan walaupun PDIP tidak institusi hukum di Malaysia namun PDIP memberi bantuan advokasi kepada korban yang disekap kepolisian Malaysia dan fenomena tersebut tidak semua parpol berani melakukannya mengingat anak kandung Asfar ketua DPC LN PDIP adalah seorang polisi Malaysia (Figo, Wawancara, 2018).

- **Demokrat**

Pendekatan birokrasi Demokrat kepada KBRI cukup membawa hasil, terlebih pada pemilu 2014 lalu salah satu caleg dari DPC LN Demokrat mendapat dukungan dari KBRI. Martini mantan aktivis DPC LN PDIP menegaskan bahwa pada pemilu 2014 KBRI sepakat untuk memenangkan Lukman Hakim ketua DPC

LN Demokrat menjadi anggota legislatif (Martini, Wawancara, 2018). Didukung dengan pengakuan Hermanto yang mengatakan pada 2014 lalu Demokrat memang memiliki pendekatan birokrasi dengan KBRI. Hermanto menyatakan bahwa saat itu memang dubes KBRI segan dengan Demokrat bahkan banyak artis dari Indonesia yang datang untuk meminta bantuan suara seperti Yenni Rahman dan Melani yang datang ke dubes namun kemudian diarahkan untuk bertemu Lukman dan Hermanto jika ingin mendapat bantuan suara (Hermanto, Wawancara, 2018).

- **PAN**

Kedekatan parpol dengan KBRI juga dilakukan oleh Partai Amanat Nasional PAN selain menolong TKI ke KBRI, PAN juga mempunyai pengaruh birokratis kepada pendukungnya. TKI yang mendukung PAN di Malaysia mempunyai terminologi tersendiri karena PAN pernah mengalami masa keterpurukan yang serius pada pemilu sebelumnya. Setelah pemilu 2014 lalu PAN Malaysia bangkit kembali untuk memperjuangkan parpol. Ali Fauzi ketua PAN Malaysia mengatakan untuk aspirasi pendukung PAN itu tetap karena PAN tetap melaksanakan pemilu dan mereka sepakat untuk mengikuti arahan ketua dan sekjen PAN (Fauzi, Wawancara, 2018).

Di samping itu memang kebanyakan kasus TKI tidak dapat terlepas dari pengaruh KBRI. Dalam hal ini parpol menginisiasi adanya bantuan advokasi yang merupakan poin penting untuk TKI yang terkena masalah. Muhammad Najib Komisi 1 DPR RI yang juga DPLN PAN berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan terhadap TKI di Malaysia advokasi hukum dibutuhkan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan serius yang berhubungan dengan penegakan

hukum sesuai porsinya. Najib mengatakan PAN di Malaysia melakukan bantuan advokasi untuk pembelaan terhadap TKI agar sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahan mereka jangan sampai mereka diberikan sanksi melebihi dari kadar kesalahannya (Najib, Wawancara, 2018).

Sebagai Institusi negara KBRI juga memiliki sistem administrasi yang baik dengan struktur yang rapi dan modern menggunakan sistem informasi. Integrasi KBRI dengan institusi negara yang lain sudah mulai di perbaiki untuk mengatur seluruh pendataan TKI menggunakan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) yang menjadi pusat sistem informasi data TKI. Dengan demikian dapat diartikan bahwa SPLN di daerah-daerah akan tercatat di SIAK oleh Kementerian Dalam Negeri dirjen kependudukan. Kemudian sistem tersebut diintegrasikan dengan *Save Travel* milik Kemenlu berdasarkan NIK TKI dan dapat diintegrasikan dengan SIDALIH milik KPU untuk mendata pemilih di Malaysia (Wahyudi R. , Wawancara, 2018).

Dari argumen Yudi tersebut dapat di klarifikasi bahwa SIAK sebagai sistem informasi yang dapat berintegrasi langsung kepada *Save Travel* milik Kemlu dapat menjadi pusat pendataan yang dapat mengurangi permasalahan dokumen serta data TKI yang dapat memudahkan pemilu. Perlindungan TKI di Malaysia dapat ditinjau langsung dalam SIAK serta NIK yang dimiliki TKI yang sudah masuk dalam sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan SIDALIH milik KPU. Hadirnya sistem informasi tersebut tentu menjadi pelengkap pelayanan KBRI di Malaysia termasuk hal perlindungan TKI yang selama ini menjadi masalah yang terus-menerus terjadi. Sistem informasi SIDALIH yang mempermudah KPU beserta parpol dalam menyukseskan pemilu di Malaysia.

3.2 Pengaruh Budaya dan Identitas Parpol di Malaysia

Kedekatan parpol secara budaya dengan TKI di Malaysia dapat diartikan sebagai proses pengaruh parpol melalui budaya, agama, olahraga, ketokohan personal dan persamaan komunitas. Dari klarifikasi tersebut parpol dengan mudah menanamkan kepercayaan terhadap TKI. Terlebih dalam konteks perlindungan yang menjadi prioritas dalam kesejahteraan TKI. Dengan demikian secara budaya parpol memiliki banyak cara yang telah dilakukan mengingat luasnya ruang lingkup untuk melakukan pendekatan budaya mempermudah parpol dalam menanamkan kepercayaan terhadap TKI di Malaysia.

Identitas TKI merupakan basis latar belakang yang menjadi poin strategis untuk parpol melakukan pendekatan budaya. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya fenomena di lapangan yang terjadi dengan pendekatan budaya. Pendekatan ini dianggap efektif untuk menarik masa politik dalam rangka menanamkan kepercayaan kepada TKI yang tidak ada paksaan didalamnya. Sehingga dapat dinilai bahwa pendekatan ini dapat dilakukan oleh parpol mana pun tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang sulit untuk menjalin relasi dengan TKI di Malaysia.

Pemetaan tempat tinggal TKI bermacam-macam lokasi ada yang bertempat tinggal di kota, desa dan pedalaman sesuai penempatan kerja masing-masing, basis TKI tersebar ke seluruh penjuru wilayah di Malaysia. Menaker Hanif Dhakiri mengakui pergerakan parpol di Malaysia yang mendatangi basis TKI hingga sampai lokasi yang jauh dari kota merupakan etika baik. Lokasi kerja mereka tersebar ada yang di sektor rumah tangga maupun di hutan tapi misalnya ada partai

yang membangun basis-basis di tempat mereka itu boleh saja dengan itu justru parpol ingin bekerja untuk mengoperasikan fungsinya. (Dhakiri, 2018)

- **PKS**

Menurut PKS, jenis kegiatan yang konsisten untuk menurunkan nilai-nilai parpol kepada TKI adalah pembinaan. Banyak TKI di Malaysia yang membutuhkan pembinaan untuk menunjang kelangsungan hidup mereka dalam pekerjaan maupun keagamaan. Kegiatan paling banyak itu tentang pembinaan yang sifatnya preventif dapat berupa pembinaan keuangan, pembinaan kehidupan sosial dan konseling (Iqbal, Wawancara, 2018). Oleh karenanya PKS lebih mementingkan pendekatan jangka panjang dibandingkan dengan laporan yang sifatnya formalitas (Buys Y. F., Wawancara, 2018).

PKS terkenal melakukan kegiatan keagamaan rutin di kalangan TKI tentu lebih mudah untuk menyukseskan kampanye. Konsistensi tersebut terjadi akibat banyaknya TKI yang dianggap mempunyai pengetahuan agama rendah sehingga tepat apa bila PKS mengadakan pengajian rutin. Walaupun tidak terus terang mengatasnamakan PKS dalam pengajian

“PKS itu liqo’ pengajian tarbiyah, sama di sini juga kegiatan utamanya itu, dan tentu ketika liqo tidak sepenuhnya membawa partai, maksudnya siapa saja boleh bergabung di liqo’, kita konsen kita itu konsen yang diajarin di ustadz-ustadz PKS itu dakwah lah katakanlah makanya kalo baca literatur itu kan bukan partai biasa ya, partai dakwah, PKS, Jadi konsen kegiatan utamanya gitu, bikin pengajian” (Buys Y. F., Wawancara, 2018).

Pendidikan PKS terhadap TKI di Malaysia tersebut secara tidak langsung merupakan proses penurunan nilai-nilai parpol yang islami kepada jamaahnya. Didukung dengan adanya pemateri dari para akademisi yang mempunyai jadwal rapi untuk mengisi pengajian *Liqo'* rutin tiap minggunya. Sesuai dengan haluan utama partai dakwah PKS lebih fokus pada metode dakwah yang dilakukan pada hari libur mingguan TKI di beberapa tempat mengumpulnya TKI di Malaysia. Misalnya di kongsi-kongsi ataupun di kantor pusat informasi PKS yang berada di Cowkit dan pengajian bulanan di KBRI bersama para staf KBRI. Rutinitas tersebut yang akhirnya mempermudah PKS melakukan kaderisasi di Malaysia entah melalui para akademisi maupun para TKI yang aktif mengikuti kajian PKS.

Terdapat poin menarik untuk di klarifikasi dalam agama yang dapat mempengaruhi TKI secara militan untuk berafiliasi dengan parpol. Hal itu dinyatakan oleh Yose salah seorang dosen Teknik Mesin IIUM bahwa apabila terdapat ketertarikan tokoh TKI disela-sela *liqo'* pada tahun politik maka PKS berikan edukasi politik karena berjihad di bidang politik juga merupakan ibadah (Buys Y. F., Wawancara, 2018). Nilai-nilai keagamaan ini pada intinya dibutuhkan para TKI untuk mengisi kebutuhan spiritual rohani mereka di tengah hiruk periuik pekerjaan yang melelahkan. Konsep dakwah tersebut dapat berjalan dengan baik karena secara budaya PKS dapat dengan mudah mendapatkan kader politik.

Kegiatan PKS juga memperluas pengaruh dengan menumbuhkan kader-kader baru di kongsi-kongsi. Sebagai lumbung TKI kongsi yang didalamnya terdapat kader parpol tentu efektif dalam membangun rasa kepercayaan. Sejumlah kongsi besar seperti yang terletak di daerah Sungai Way yang terdapat kader PKS pasti dapat mendukung penuh PKS dan menjalin hubungan untuk perlindungan TKI

yang mendapat masalah. Iqbal menegaskan bahwa PKS memiliki kegiatan rutin bersama TKI untuk bimbingan dan bantuan hukum. Iqbal mengatakan PKS melakukan advokasi hukum kepada TKI ketika ada kasus terjadi kepada TKI ketika PKS turun ke pabrik-pabrik atau ke kebun-kebun (Iqbal, Wawancara, 2018). Pengawasan tersebut merupakan konektivitas hubungan yang saling menguntungkan. Mengingat PKS mempunyai *PKS Fans Club* sebagai pusat informasi pembinaan dan advokasi. Iqbal juga menegaskan selama kuliah 7 tahun dari S1 sampai S3 dia banyak melakukan pembinaan dan advokasi TKI di Malaysia (Iqbal, Wawancara, 2018).

- **Gerindra**

Layaknya PKS, sebagai parpol yang mulai membangun basisnya di Malaysia, Gerindra juga melakukan *blusukan* di beberapa tempat dan membuat terobosan unik dalam kampanye yaitu dengan pertandingan bola. Pemukiman TKI yang menyebar tidak menjadi alasan Gerindra untuk membangun basis. Pergerakan Gerindra pada tahun 2018 ini sudah mulai muncul di kongsi-kongsi, di kilang-kilang dan pemukiman masyarakat (Muis D. B., Wawancara, 2018). Inovasi kampanye tersebut lebih mengarah kepada TKI yang suka tanding bola. Program tanding bola antar komunitas asal daerah TKI menjadi terobosan baru dalam kampanye di beberapa paguyuban yang sejauh ini sudah 23 klub yang sudah dikelola Gerindra dalam suatu pertandingan untuk memenangkan 1700 ringgit bagi juara 1 dalam sekali pertandingan (Muis D. B., Wawancara, 2018).

Pendekatan bola yang dilakukan oleh Gerindra tidak serta merta dapat menarik perhatian semua golongan. Ada beberapa paguyuban yang sukar untuk

gabung dengan tim Gerindra itu. Dengan berbagai alasan di lontarkan namun intinya adalah penolakan pengaruh Gerindra terhadap beberapa paguyuban. Dasril mengatakan secara budaya Gerindra menarik ketua paguyuban menjadi tim inti sedangkan mereka tetap masuk di paguyuban itu, misal ada masuk Bandung, dia masuk ke Gerindra dengan demikian kami akan ambil tiga atau empat orang dari tiap-tiap paguyuban TKI (Muis D. B., Wawancara, 2018).

- **PKB**

Sebagai parpol yang mempunyai ideologi konservatisme dan lahir dari rahim NU PKB juga melakukan pendekatan melalui keagamaan. Seperti *tahlilan*, *fatayatan*, *maulidan* dan *manakiban*. Semua itu merupakan bentuk loyalitas PKB dengan NU yang merupakan sumber madzhab yang dianut dari NU. Di Malaysia hubungan PKB dan NU kuat karena PKB itu dilahirkan dari rahim NU, bagaimanapun juga hubungan sejarah mereka kuat (Aiman, Wawancara, 2018). Secara historis argumen tersebut menjadi alasan bagi ketua DPC LN PKB Malaysia yang dapat mempengaruhi eksistensi PKB melewati banyaknya kegiatan yang dimiliki NU di Malaysia.

Muslimat NU mempunyai hubungan erat dengan PKB dalam kegiatan rutusnya dimana ketua Muslimat Malaysia Mimin Minarsih yang juga merupakan pengurus PKB menyadari kedekatan tersebut. Terlebih muslimat mempunyai banyak kegiatan yang diikuti banyak anggota justru menjadi angin segar yang terus menerus menghidupi PKB untuk menjaga kepercayaan terhadap TKI khususnya anggota Muslimat. Mimin Mengatakan yang pasti PKB punya kegiatan rutin yaitu mujahadah (Mintarsih, Wawancara, 2018).

Selain PKB, parpol lain juga memiliki saluran kepada NU untuk melakukan pendekatan budaya. Hal itu di nyatakan oleh argumen Munir yang mengatakan “*Bergerak-bergerak juga tapi ya yang selama ini partai-partai lain yang nampak itu tahlilan, yang jelas macam ada mujahadah, ada yang bulanan*” (Munir, Wawancara, 2018).

Melihat banyaknya jumlah anggota NU yang menjadi tokoh dari TKI di Malaysia, akibatnya beberapa tokoh NU juga pengurus parpol lain di Malaysia dan untuk menjalin pengaruh kepada TKI tokoh tersebut juga melaksanakan *mujahadah* bulanan. Iqbal ujar Iqbal ketua PPI IIUM menambahkan bahwa di Malaysia para aktivis NU dan Muhammadiyah juga berafiliasi dengan Parpol melalui individu-individu parpol yang juga anggota NU atau Muhammadiyah (Iqbal, Wawancara, 2018).

- **PAN**

Sejarah singkat mengenai PAN di Malaysia baru muncul kembali setelah muncul inisiatif *rebuilding* PAN di Malaysia pada akhir Desember 2017 kemarin, penggagas utamanya adalah Ikatan Alumni Karang Asem Malaysia IAKAM yang merupakan komunitas alumni pondok pesantren Karang Asem yang berbasis Muhammadiyah dan mempunyai inisiatif bahwa mereka adalah tombak baru kebangkitan PAN di Malaysia. Khairuddin sekjen PAN di Malaysia mengatakan bahwa PAN di Malaysia berdiri kembali dari perkumpulan Ikatan Alumni Karang Asem IAKAM dimana dalam perkumpulan tersebut Khairuddin sebagai ketuanya dan Ali bendaharanya, namun berbalik ketika mereka berada di PAN kedudukan Ali sebagai ketuanya dan Khairuddin sekjennya (Khairuddin, Wawancara, 2018).

Dengan demikian petinggi PAN di Malaysia adalah petinggi IAKAM sehingga antara PAN dan IAKAM telah berafiliasi sejak berdiri kembalinya PAN di Malaysia.

Usaha besar ditunjukkan oleh PAN Malaysia yang tidak mendapat dukungan dari DPP PAN Jakarta dalam memajukan parpolnya di Malaysia. Sosialisasi PAN di kongsi-kongsi telah dilakukan oleh pengurus parpolnya, namun tidak ada bantuan dana untuk sosialisasi tersebut. Khairuddin Sekjen DPP LN PAN Malaysia mengutarakan kesaksiannya bahwa sosialisasi yang PAN lakukan sudah ratusan juta namun PAN tidak mengatasmamakan partai untuk menghapus sejarah kelam PAN di Malaysia (Khairuddin, Wawancara, 2018).

Analisa penulis pada PAN di Malaysia menuai banyak cerita karena PAN di Malaysia berbeda dengan yang parpol lainnya. Masalah internal PAN memang tidak mudah untuk dikembalikan lagi, namun dukungan aktivis PAN dari bawah cukup kuat untuk menghadapi pemilu. Argumen Ali Fauzi menyatakan:

“Secara resmi, itu pun gak resmi di atas materai enam ribu, untuk ormas, istilahnya ormas TKI yang ada di Malaysia, yang bergabung dengan saya dengan PAN, itu tidak kurang dari sepuluh ormas NGO tadilah, IAKAM, Forpes, Forum Pemuda Semuran, HTKP (Himpunan Tenaga Kerja Perantau) Malaysia, lalu IGM, Himpunan Warga Muhammadiyah Bulu Malaysia, Lamongan juga, HWMP Himpunan Warga Muhammadiyah, IKAWAMURAU Ikatan Keluarga Muhammadiyah, termasuk PA, IWJ. banyaklah kita” (Fauzi, Wawancara, 2018).

mereka semua menjadi pendukung PAN Malaysia untuk tetap eksis di perpolitikan TKI dengan tujuan membantu TKI keluarga PAN di Malaysia. Sayangnya PAN hanya bisa mengenalkan parpol saja kepada TKI walaupun terdapat 1000 lebih anggota IAKAM yang tersebar di wilayah Kuala Lumpur, Johor, Penang, Kedah, Trengganu dan sekitarnya sekitar yang sepenuhnya siap mendukung PAN ujar Khairuddin sekjen DPC LN PAN (Khairuddin, Wawancara, 2018).

Elit politik DPP LN PAN mempunyai pengaruh besar di beberapa wilayah di Malaysia, kekerabatan PAN dengan TKI di beberapa wilayah cukup mendapat dukungan tinggi. Diantara wilayah yang menjadi basis PAN adalah Kampung Baru dan berbagai tempat. Jumlah anggota PAN yang menjadi TKI mencapai 80% sehingga kepedulian terhadap TKI sangat besar, kebetulan mereka semua mempunyai jaringan 5000 TKI di wilayah Kampung Baru didukung dengan figur Khoiruddin sebagai tokoh masyarakat (Fauzi, Wawancara, 2018). Khairuddin menambahkan bahwa enam pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah dan pimpinan ranting istimewa Aisiyah termasuk Wilayah Cabang Ikatan Muhammadiyah WCIM juga mendukung PAN di Malaysia (Khairuddin, Wawancara, 2018).

- **PPP**

Lain halnya dengan PPP yang mempunyai pendekatan birokrasi kuat terhadap masyarakat Minang di Malaysia. Dato' Zainul Arifin berpendapat bahwa kedudukannya di himpunan masyarakat Belitung dan komunitas PERMAI telah meyakinkannya atas besarnya dukungan mereka ke PPP. Dato' Zainul mengatakan:

“Saya kan ketua Himpunan Masyarakat Bangka Belitung dan juga saya kan sekjen PERMAI kalau ikatan tua saya ada dukungan Masyarakat Minang”
(Arifin, Wawancara, 2018).

- **PDIP**

Alat komunikasi sekarang sudah mulai canggih PDIP memiliki sejarah singkat yang berhubungan dengan media sosial dan tentunya juga unik dan memiliki pengaruh budaya terhadap TKI. Asfar yang di kenal dengan nama “Ucok” itu menggunakan Facebook sebagai alat yang digunakan untuk menginisiasi PDIP Malaysia. Asfar berpendapat:

“Dari 2013, setelah keluar dari Demokrat itu, saya ceburin diri lagi di partai tahun 2013, teman-teman yang saya galang tadi itu dari ormas saya buat atas nama partai, saya buatlah facebooknya, saya cari partai mana yang tidak ada ketuanya di sini. Masa itu PDIP gak ada ketuanya, saya mau komunikasi dengan DPP tidak ada jalan, tahun depan mau pemilu ini” (Asfar, Wawancara, 2018).

Pada akhirnya Facebook menjadi wadah komunikasi budaya parpol yang berpengaruh karena dapat dijadikan salah satu media informasi untuk mengampanyekan PDIP di Malaysia.

3.3 Pengaruh Langsung parpol di Malaysia

Pengaruh parpol secara langsung dapat di artikan sebagai pengaruh yang dilakukan langsung seperti orasi langsung, pendidikan politik langsung dan kampanye langsung. Pendekatan ini biasanya dilakukan parpol mendekati masa pemilu untuk mengumpulkan masa politik secara cepat. Bentuknya bermacam-

macam sesuai dengan strategi politik parpol jangka pendek. Hal itu dapat dikategorikan diantara kampanye secara langsung bertemu TKI di tempatnya atau berkampanye lewat media sosial yang cenderung digunakan TKI seperti whatsapp, line, instagram, twiter maupun facebook dimasa kampanye sehingga parpol dapat menjangkau TKI di pedalaman dan mengurangi biaya kampanye.

Pendekatan parpol secara langsung ini biasanya mendapat dukungan dari parpol pusat yang ada di Indonesia. Dukungan tersebut berupa finansial maupun sembako yang disumbangkan dari calon legislatif yang ingin memenangkan kursi di DPR RI. Melalui dapil 2 DKI Jakarta suara TKI cukup signifikan untuk memenangkan beberapa caleg di DPR RI. Oleh karenanya dalam pendekatan ini rentan terjadi politik praktis yang dilakukan parpol. didukung dengan fikiran pragmatis oknum TKI yang hanya ingin mendapatkan uang atau sembako dari parpol agar dapat mendukunnya pada pemilu.

Walaupun bukan hanya TKI yang memiliki hak pilih di Malaysia namun prioritas parpol lebih menysasar TKI dari pada pelajar. Iqbal ketua PPI IIUM yang juga merupakan anggota Panitia Pemilihan Pemilu 2019 di Malaysia mengatakan bahwa target parpol bukan mahasiswa melainkan mereka berhubungan langsung kepada TKI langsung datang ke kilang dan ke pabrik atau datang langsung ke tempat dimana terdapat ribuan TKI tinggal (Iqbal, Wawancara, 2018).

- **PDIP**

Pendekatan langsung PDIP dalam kampanye ke kongsi-kongsi telah menuai hasil yang signifikan. Setidaknya terdapat 6 bus TKI yang dapat di bawa PDIP ke

KBRI untuk melakukan pencoblosan dengan dukungan penuh atas PDIP. Martini mengatakan:

“2014 itu sudah mendatangkan kongsi-kongsi perkebunan waktu itu dari kilang JME waktu itu ada waktu itu dari kilang perkebunan sawit 6 bis yang saya bawa waktu itu saya kan kampanye ke tempat mereka” (Martini, Wawancara, 2018).

Begitu pula di ruang terbuka seperti Mall dan pertokoan PDIP menggunakan banner-banner dimana orang Indonesia berkumpul untuk mengenalkan perjuangan PDIP kepada mereka (Martini, Wawancara, 2018).

Upaya dalam aktivitas kampanye PDIP secara langsung di Malaysia tidaklah mudah terlebih untuk memperluas cabangnya ke beberapa daerah. Agar PDIP dapat membesarkan parpol mereka harus melantik beberapa orang untuk dijadikan kader. Asfar berkata sebelum pemilu adalah waktu yang tepat untuk menggalang kader parpol sampai ke Sabah, Serawak, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur sendiri (Asfar, Wawancara, 2018).

- **PKS**

PKS lebih mentaati peraturan negara dibandingkan dengan parpol lainya yang melakukan kampanye di tempat-tempat terbuka atau lokasi berkumpulnya TKI di beberapa wilayah. Kampanye secara langsung di aula terbuka sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum negara Malaysia karena sebenarnya di luar negeri kita tidak boleh berpolitik namun PKS berkampanye langsung di aula kedutaan didukung dengan komunikasi di beberapa tempat kata Iqbal DLPN PKS (Iqbal, Wawancara, 2018). Hal itu dilakukan PKS karena pendekatan budaya dirasa cukup

untuk mendapatkan suara. Dilengkapi dengan pemanfaatan momen dan pemanfaatan sosial media “*Dari sisi orangnya mungkin biasalah darat dan udara, darat tu ke wilayah, udara di medsos, kalo tapi ya udah darat berarti kan kaya momen bulan puasa ini bentar lagi, adalah kita program buka puasa Bersama, ceramah Ramadhan gitu*” (Buys Y. F., Wawancara, 2018).

- **Demokrat**

Di Malaysia, kampanye langsung berakibat fatal apabila tidak mendapat pengawasan ketat oleh Badan Pengawas Pemilu BAWASLU ataupun PPLN yang mengemban amanah KPU. Politik praktis dapat terjadi oleh parpol yang mengambil jalan pintas untuk menang pemilu. Keterbatasan PPLN dan juga Bawaslu dalam mengawal jalanya pemilu di Malaysia untuk mengatasi terjadinya kampanye gelap yang dilakukan parpol terhadap TKI. Lukman mengatakan bahwa mobil yang membawa TKI menuju tempat penyoblosan dihadang di tengah jalan kemudian mereka diberi amplop untuk mendukung parpol tertentu dengan demikian peluang menang wajar didapatkan oleh parpol tersebut (Hakim L. , Wawancara, 2018).

Berbagai cara parpol mendapatkan suara di Malaysia ketika pemilu berlangsung, terdapat banyak kesempatan serta peluang untuk menang. Berkaca pada pemilu 2014 lalu banyak cerita yang meresahkan terlontar dari para elite politik. Dari peristiwa yang terjadi di belakang TPS, posko dan drop box terdapat aktivitas parpol yang mengambil jalur singkat untuk menang. Iqbal mengatakan:

“Ada yang mandor ada yang langsung ada yang TPS ada pos ada nah pos ini yang riskan kalau saya berhasil menembus agen-agen berarti saya mendapat suara banyak kan suara itu yang menembus pabrik-pabrik itu di

dalam juga enggak tau cara menembusnya kalau enggak kenal teman enggak tau cara menembusnya” (Iqbal, Wawancara, 2018).

Hal itu diperjelas dengan klarifikasi dalam proses pengiriman surat suara dari Indonesia sampai ke Malaysia melewati institusi KBRI. Dato’ Zainul mengatakan regulasi surat suara dari KPU Indonesia dikirim ke KBRI, kemudian dikirim ke kantor pos Malaysia seperti Kelantan dan Johor atau wilayah KJRI, namun terjadi aktivitas parpol di kantor pos Malaysia dan mereka mengambil surat suara di situ dengan membayar pejabat posnya, setelah itu suaranya dibawa ke kompi-kompi untuk di coblos kemudian dibawa lagi ke kantor pos Malaysia waktu ke kantor pos Malaysia kemudian di kirim ke KBRI, dibuka dan dihitung KBRI atas nama TKI (Arifin, Wawancara, 2018).

- **PKB**

Begitu pula koalisi PKB bersama 4 parpol pendukung Jokowi yang melakukan kampanye langsung ke beberapa kongsi dan kilang. Mimin ketua Muslimat NU sekaligus pengurus PKB mengatakan bahwa pada pilpres 2014 PKB berkoalisi dengan tiga parpol hanura, Nasdem dan PDIP dalam koalisis tersebut mereka melakukan kampanye ke kongsi langsung untuk mendapat dukungan TKI (Mintarsih, Wawancara, 2018).

Melalui sosial media PKB berkampanye langsung dengan para TKI hal itu dianggap lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan sarana komunikasi seperti grup-grup WhatsApp dan Facebook dilakukan PKB untuk berkampanye dengan lebih efisien. PKB menggunakan metode berbeda dalam proses kampanye, mereka hanya melakukan sosialisasi dan komunikasi lewat Facebook atau WhatsApp grup

komunitas kemudian setelah tersebar di grup-grup komunitas PKB dapat memperluas ke komunitas lain dari anggota grup tersebut (Aiman, Wawancara, 2018).

Menjelang pemilu 2019 ini PKB sudah mulai melakukan kampanye langsung dengan mendirikan posko cinta di beberapa tempat di Malaysia. Kemudian dari posko tersebut PKB membuat kegiatan rutin dengan masyarakat terhitung dua kali dalam sebulan (Mintarsih, Wawancara, 2018). Saiful ketua DPP LN PKB menegaskan bahwa posko cinta tersebut di operasikan PKB di Selangor, Johor, Penang karena parpol yang lain tidak membuat posko (Aiman, Wawancara, 2018).

Tabel 4. Ringkasan pendekatan parpol terhadap TKI di Malaysia

Pendekatan Birokrasi	Pendekatan Budaya dan Identitas	Pendekatan Langsung
<p>Menjadi calo untuk legalitas dokumen TKI ilegal ke KBRI.</p> <p>Menggunakan oknum di KBRI atau KJRI untuk mengatur perlindungan TKI.</p> <p>Parpol dan KBRI memiliki hubungan khusus atas kesamaan parpol.</p> <p>Keterikatan alamat rumah elit politik untuk suara ribuan TKI.</p> <p>Keterikatan dana parpol pusat untuk agenda TKI.</p>	<p>Membangun basis parpol di kongsi-kongsi.</p> <p>Melakukan pembinaan keuangan, sosial, dan konseling.</p> <p>Mengadakan <i>liqo</i> ' atau pengajian rutin, <i>mujahadah</i>, <i>manakiban</i>, <i>tahlilan</i> dan <i>Maulidan</i>.</p> <p>Mengadakan pertandingan sepak bola antar daerah asal TKI.</p> <p>Melantik TKI menjadi pengurus parpol.</p>	<p>Melakukan kampanye politik langsung ke kongsi-kongsi.</p> <p>Membawa masa kampanye dari kongsi-kongsi ke KPU di kedutaan.</p> <p>Bersosialisasi langsung dengan para TKI di aula, tempat mengumpulnya TKI dan mall pusat perbelanjaan.</p> <p>Berkampanye langsung melalui medsos (Facebook dan WhatAapp komunitas).</p>

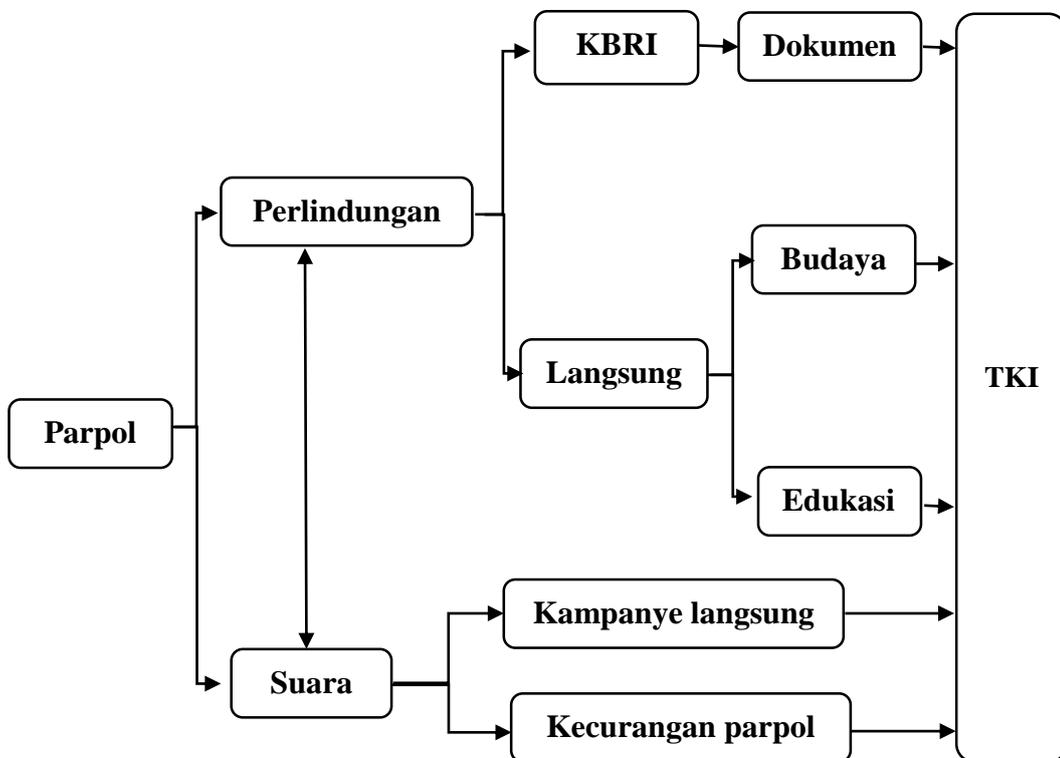
<p>Menjalin kerja sama dengan mandor di kilang-kilang.</p> <p>Memberi bantuan advokasi hukum.</p>	<p>Menggunakan ketokohan atau <i>personal power</i> sebagai pelindung TKI.</p>	<p>Melakukan politik praktis dengan para TKI di masa pemilu.</p> <p>mengatur surat suara dengan KBRI ketika pemilu berlangsung melalui PPLN.</p>
---	--	--

3.4 Konteks Malaysia dalam aktivitas parpol

Perlindungan TKI di Malaysia memiliki makna yang substansial di dalam aktivitas parpol. Untuk mencapai perlindungan tersebut TKI butuh kenyamanan sosial maupun budaya yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Dasar dari perlindungan tersebut dapat didefinisikan sebagai kebutuhan bagi TKI yang dapat diklarifikasi antara lain hak atas hidup, hukum, kesehatan, agama, identitas, budaya dan lingkungan. Semuanya merupakan aktivitas bagi parpol yang ingin mendapatkan konsituen politik terhadap TKI di Malaysia.

Melalui pendekatan birokratis dan budaya upaya perlindungan parpol semakin kuat. Konteks perlindungan menjadi sisi penting yang mewarnai aktivitas papol terhadap TKI di Malaysia. Banyaknya permasalahan yang dimiliki TKI telah membuat aktivitas parpol semakin unik dalam menanamkan kepercayaan terhadap TKI. Hubungan antara perlindungan dengan pendapatan suara pemilu menjadi fenomena yang menarik karena bagi parpol keduanya memiliki keterikatan yang sama-sama dilakukan parpol untuk mendapatkan kepercayaan terhadap TKI.

Tabel 3. Diagram analisis pendekatan parpol terhadap TKI di Malaysia



Dalam kasus pengambilan data tersebut penulis melihat bahwa aktivitas parpol di Malaysia itu dibentuk oleh KBRI dan TKI sehingga membentuk aktivitas unik yang menarik untuk dibahas. Keunikan antara parpol, KBRI dan TKI terletak pada konektivitas kegiatan antara hubungan TKI dengan KBRI yang dijembatani oleh parpol. Terdapat 2 juta lebih populasi TKI di Malaysia yang menentukan eksistensi parpol. Aktivitas parpol tersebut bertujuan untuk mendapatkan suara dan mencapai kepentingan pribadi elite parpol. TKI merupakan konsituen utama parpol sehingga parpol harus memperhatikan TKI sebagai konsituennya di Malaysia.

Maka dari itu parpol harus memperhatikan perlindungan sebagai aspek yang menjadi kebutuhan utama TKI. Sehingga aktivitas parpol banyak yang diarahkan

kepada perlindungan dan penolongannya. Namun di sisi lain TKI juga lumbung suara yang dapat didekati dengan cara yang lebih pragmatis, yaitu dengan melalui pendekatan identitas. Hal itu yang menyebabkan karakteristik gerakan parpol bergulir dengan TKI secara dinamis karena hadirnya parpol di Malaysia menguntungkan elit parpol serta membantu KBRI untuk menangani masalah perlindungan terhadap TKI.

Ketika parpol mengutamakan perlindungan maka parpol tidak lepas dari konteks KBRI. KBRI tersebut merupakan pelindung hukum resmi dan birokrasi di Malaysia. Disisi lain KBRI juga sebagai perwakilan resmi negara Indonesia di Kuala Lumpur sehingga hubungan parpol dengan KBRI dalam konteks perlindungan itu sangat penting. Oleh karenanya parpol harus menjaga betul hubungan mereka dengan KBRI karena sulit untuk parpol menjalankan perannya tanpa KBRI.

Undang-undang perlindungan TKI di Malaysia nampaknya belum teruji kelayakannya dengan kondisi di lapangan. Sebagai badan formal pemerintah hanya dapat berkontribusi dalam perlindungan TKI legal atau mempunyai dokumen resmi. Sedangkan di Malaysia banyak TKI yang tidak mempunyai dokumen atau menjadi ilegal akibat perubahan tempat kerja mereka tidak dapat dilindungi undang-undang. Figo ketua SERANTAU berpendapat bahwa peran parpol di luar negeri dalam membantu perlindungan TKI telah menjadi tuntutan untuk memperjuangkan undang-undang karena itu dianggap paling efektif dalam perlindungan (Figo, Wawancara, 2018).

Di sisi lain elite politik berusaha untuk menjadi ketua parpol di Malaysia beberapa pengurus Partai Demokrat Malaysia keluar dan mendirikan parpol baru. Dalam hal ini sekjen DPC LN Demokrat mengatakan bahwa beberapa tokoh seperti Ucok (ketua DPC LN PDIP), Tohong (ketua DPC LN Hanura), Edi (ketua DPC LN Golkar) dan Adnan (ketua DPC LN Nasdem) dahulu semuanya merupakan kader dari DPC LN Demokrat, kemudian tinggal Hermanto dan Lukman yang dapat bertahan di DPC LN Demokrat sampai saat ini (Hermanto, Wawancara, 2018). Artinya memiliki kedudukan sebagai ketua parpol di Malaysia merupakan identitas penting untuk membangun relasi dengan KBRI.

Banyak ketua parpol di Malaysia yang dulunya mereka adalah ketua organisasi ataupun sebagai pengurus organisasi. Mereka yang sesungguhnya mempunyai pengaruh politik dan mempunyai *cultural power* mempunyai peluang untuk eksis menjadi pengurus parpol agar dekat dengan KBRI. Terdapat ketua paguyuban yang beralih menjadi pengurus parpol. Imam Fajar ketua Ikatan Madura IKMA mengatakan Munir mantan ketua IKMA sekarang menjadi pengurus PKB (Fajar, 2018).

Independensi KBRI tidak sepenuhnya membawa kesejahteraan bagi TKI karena banyak kasus yang diselamatkan oleh tokoh parpol yang juga tokoh masyarakat di Malaysia. Dalam hal ini ketua PDIP mendapatkan keistimewaan dari KBRI berupa mudahnya akses untuk menghubungi KBRI. Ketua DPC LN PDIP mengatakan banyak kasus TKI yang diselamatkan parpol namun PDIP menyerahkannya kasustersebut ke KBRI karena mereka sudah mengerti kedudukan Asfar sebagai ketua parpol (Asfar, Wawancara, 2018).

Kondisi sosial politik di Malaysia tidak luput dengan adanya kepentingan serta peluang untuk mencapai kesejahteraan parpol namun faktanya banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan. Kurang lebih 700 TKI setiap harinya datang ke KBRI untuk mengadukan permasalahan mereka, sehingga untuk mendapatkan pelayanan dari KBRI dibutuhkan perlindungan seperti LSM, komunitas, ormas dan parpol. Analisis tersebut muncul dari anggapan sekjen DPC LN Demokrat bahwa diplomat segan berhadapan dengan masyarakat karena banyak isu-isu yang tidak diselesaikan (Hermanto, Wawancara, 2018).

Untuk aktif membantu TKI di Malaysia parpol harus memiliki penghasilan, karena banyak sekali kasus yang membutuhkan dana dalam penyelesaiannya. PKB sebagai salah satu parpol yang aktif membantu TKI telah memiliki penghasilan sendiri. Ketua DPC LN PKB berargumen bahwa mereka mempunyai usaha bakso untuk mengantisipasi TKI yang meminta pertolongan dan tidak memiliki dana untuk mengurus permasalahannya (Aiman, Wawancara, 2018).

TKI di Malaysia yang berhubungan dengan PKB mendapatkan perlindungan dengan baik, karena PKB dapat membantu pendanaan dan dokumentasi kepada TKI yang terkena masalah, seperti contoh pernah ada TKI sakit parah di rumah sakit yang harus di pulangkan. Ketua DPC LN PKB mengatakan terdapat permisalan salah satu kasus yang ditangani PKB dengan dana iuran parpol, PKB menangani TKI dari rumah sakit dan mengurus dokumentasinya ke KBRI setelah itu memulangkannya (Aiman, Wawancara, 2018).

Perlindungan bagi TKI yang dilakukan oleh parpol tidak lepas dari hubungannya dengan KBRI dengan melihat kapasitas permasalahannya.

kemampuan parpol terbatas karena tidak mempunyai wewenang penuh secara hukum untuk melakukan perlindungan. Ketua DPC LN Gerindra mengatakan apabila terjadi masalah besar diperhatikan Gerindra seperti masalah besar di Kelantan namun jika terjadi masalah kecil Gerindra hanya mampu mengantar sampai KBRI (Muis D. B., Wawancara, 2018).

TKI ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi bagaimanapun alasannya tetaplah sulit untuk mendapatkan perlindungan dari KBRI. Terdapat ratusan ribu TKI ilegal di Malaysia namun KBRI tidak bisa mengayomi bahkan terkesan terjadi pembiaran pada mereka. Pernah dibentuk PERMAI sebagai usaha pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut namun kemudian dibubarkan. Ketua DPC LN PPP mengatakan PERMAI seharusnya dioperasikan KBRI karena KBRI tidak dapat menjangkau TKI yang ilegal padahal banyak TKI ilegal yang bermasalah dan tidak bisa masuk ke KBRI (Arifin, Wawancara, 2018).

Para elit politik parpol di Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri di depan KBRI dibandingkan dengan TKI biasa yang tidak mempunyai identitas politikus maupun ketokohan. Ketua DPC LN Gerindra mengatakan:

“Istilahnya begini loh, yang saya enggak suka tuh begini, di kedutaan tu, kenapa melayani orang tu harus ada orang yang berpengaruh? Kadang orang partai baru dilayani, orang-orang yang gak kenal orang partai, minta tolong siapa?” (Muis D. B., Wawancara, 2018).

Dalam konteks perlindungan ketua DPC LN PDIP mempunyai perumpamaan yang menarik terkait parpol yang mengurus proses legalitas dokumen TKI di Malaysia. Ketua DPC LN PDIP mengatakan bahwa mengurus

legalitas TKI itu seperti mengurus lembu yang ingin dijual namun didokumentasikan terlebih dahulu dan ketika akan dijual kemudian ditulis namanya dan apabila proses dokumentasi selesai maka lembu tadi sudah bisa dijual (Asfar, Wawancara, 2018).

Aktivitas parpol terhadap TKI juga diwarnai dengan kepentingan pribadi elite parpol yang melakukan pencaloan terhadap TKI dalam perlindungannya. Hal itu ditunjukkan oleh Martini mantan TKI yang juga pengurus DPC LN PDIP Malaysia tahun 2014. Martini mengatakan bahwa parpol menolong TKI karena ada timbal balik mereka memposisikan diri sebagai calo yang jual jasa kepada TKI dengan sebagian menjelek-jelekkkan KBRI sementara yang lain seperti komunitas tidak seperti itu (Martini, Wawancara, 2018). Sehingga Martini yang juga TKI waktu itu melihat teman seperjuangan PDIP yang melakukan pencaloan resah, karena timbul inisiatif saling jelek-menjelekkkan akibat tokoh parpol tersebut tidak terima di klarifikasi sebagai calo (Martini, Wawancara, 2018).

Klaim dari perilaku pencaloan yang terjadi pada aktivitas parpol terhadap TKI dibalik banyaknya masalah TKI di Malaysia juga ditegaskan oleh Yudi ketua INFEST. Dalam hal ini Yudi menyatakan bahwa mereka-mereka parpol yang melihat masalah dan berbicara banyak padahal sebenarnya mereka oknum dari masalah tersebut, jadi mereka membahas proses pencaloan namun mereka bagian dari calo tersebut untungnya mereka sudah terklarifikasi oleh diplomat-diplomat KBRI (Wahyudi R. , Wawancara, 2018).

Namun klaim Yudi atas perilaku pencaloan parpol tersebut ditanggapi oleh ketua DPC LN PDIP yang berpendapat calo yang terindikasi oleh KBRI sulit

mendapat akses untuk masuk ke KBRI. Ketua DPC LN PDIP mengatakan bagi parpol yang telah terindikasi melakukan aktivitas pencaloan tidak mendapat keistimewaan oleh KBRI bahkan tidak banyak dari mereka yang mengalami penolakan (Asfar, Wawancara, 2018). Didukung dengan pendapatnya yang menjelaskan bahwa parpol hanya menolong TKI yang membutuhkan pertolongan agar dapat mengatasi permasalahannya. Ketua DPC LN PDIP Mengatakan bahwa TKI ilegal itu terlantar sehingga tidak dapat memiliki akses ke KBRI kemudian mereka meminta tolong ke parpol maupun ormas karena tidak memiliki jalan lain untuk melegalkan status TKI (Asfar, Wawancara, 2018).

Dalam proses legalitas TKI kepada KBRI tidak dapat dilepaskan dari bantuan parpol maupun calo dan tokoh masyarakat di Malaysia. Identitas calo dengan oknum KBRI tidak mudah terungkap dengan alasan bahwa calo tersebut tidak ingin dirinya di klaim sebagai calo. Ketua DPC LN PDIP Malaysia mengatakan bahwa tidak semua calo ingin mengakui identitasnya sebagai calo karena hubungan mereka dengan oknum KBRI harus dijaga (Asfar, Wawancara, 2018).

Dinamika untuk mendapat perlindungan TKI tidak semudah prosedur yang telah pemerintah buat. Proses pencaloan dalam layanan pembuatan visa di KBRI menyimpang oleh beberapa oknum sehingga tidak sedikit TKI yang ingin mendapatkan dokumen resmi namun mereka menempuh jalur alternatif. Oleh karenanya dapat dikatakan kelangsungan proses pembuatan visa melalui jalur pencaloan di KBRI terjadi sampai sekarang. Ketua DPC LN PDIP mengatakan banyak staf KBRI yang menyalahgunakan wewenang dengan masih terjadinya pencaloan di KBRI karena yang seharusnya tidak dapat membuat paspor tiba-tiba

dapat membuat paspor resmi dari KBRI (Asfar, Wawancara, 2018). Hal itu ditegaskan dengan argumen sekjen DPC LN Demokrat yang menjelaskan bahwa memang terdapat oknum KBRI yang melakukan pencaloan dan tertangkap oleh aparat penegak hukum. Sekjen DPC LN Demokrat berpendapat bahwa terdapat oknum KBRI yang melakukan pencaloan terbukti dengan adanya Dwi atase migrasi yang tertangkap dan dipenjara empat tahun (Hermanto, Wawancara, 2018).

KBRI muncul sebagai entitas penting dalam diplomasi antar negara dan dokumentasi. Fungsi KBRI melindungi WNI di Malaysia apabila terjadi kasus hukum pada TKI maka KBRI menjadi pelindung resmi negara yang dapat berdiplomasi dengan pemerintah Malaysia. Dalam dokumentasi TKI fungsi KBRI memang memberikan legalitas dokumen agar TKI dapat berkerja dengan status resmi. Oleh karenanya TKI memiliki ketergantungan dengan KBRI untuk mendapatkan legalitas.

Kenyamanan TKI dalam mengisi aktivitas di hari libur mingguan tidak lepas dari agenda rutinan yang sering dilakukan bersama. Penulis meninjau bahwa terjadi beberapa kegiatan dikalangan TKI yang berkaitan dengan keolahragaan. Kegiatan tersebut seperti futsal, sepak bola dan olah raga lainnya. Kegiatan tersebut biasa dilakukan kelompok TKI yang memiliki kesamaan profesi ataupun kesamaan daerah asal. Untuk menambah semangat mereka mengadakan kompetisi dengan menyesuaikan even-even pada peringatan hari besar dengan begitu peran parpol hadir untuk mewarnai kegiatan mereka.

Kesibukan TKI pada pekerjaan membuat mereka jenuh sehingga mereka merindukan suasana layaknya di kampung halaman. Untuk memberi fasilitas

kenyamanan akan keresahan tersebut. Parpol kemudian membuat aktivitas kepada TKI agar tercipta ketenangan dan kenyamanan di tanah rantau. Terdapat beberapa aktivitas parpol yang membuat mereka nyaman diantaranya kegiatan olahraga, pengajian, *tahlilan*, *yasinan*, liqo', sunat masal dan qurban. Kesemuanya merupakan agenda yang biasa dilakukan TKI di kampung halaman mereka dengan harapan dapat mengobati kesibukan kerja.

Parpol juga memberi sarana edukasi bagi TKI untuk meningkatkan SDM dan skil individu mereka. Pelatihan yang parpol lakukan seputar kebutuhan TKI dalam mengatur keuangan, manajemen stres dengan bimbingan konseling, pelatihan kekeluargaan dan pelatihan keagamaan. Hal itu dilakukan parpol karena berkaitan erat dengan kebutuhan primer TKI. Khususnya edukasi keagamaan melalui pengajian dan sejenisnya juga menjadi kebutuhan spiritual mereka akan kenyamanan menurut kepercayaan mereka.

Interaksi parpol dengan KBRI bermacam-macam caranya PKS yang mempunyai banyak Sumber Daya Manusia SDM tinggi lebih mudah mengikat persahabatan dengan KBRI. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan ketua devisi luar negeri PKS yang mengisi pelatihan di KBRI. Iqbal mengatakan dirinya melakukan pelatihan-pelatihan seperti halnya pengaturan keuangan, bahasa, bahkan langsung kepada KBRI (Iqbal, Wawancara, 2018). Meskipun tidak secara birokratis PKS mempunyai kedekatan yang kuat dengan KBRI seperti PKB sekarang, setidaknya PKS dapat memperkuat pengaruhnya terhadap KBRI melalui pelatihan tersebut.

Kampanye langsung parpol kepada TKI di Malaysia merupakan aktivitas yang legal dilakukan. Kebutuhan parpol akan dukungan suara pemilu menjadi

tujuan parpol dimanapun. Parpol melakukan aktivitas sesuai kebutuhan TKI sehingga adaptasi antara parpol dengan TKI berjalan dengan baik. Dukungan parpol dari pusat di Jakarta membuat aktivitas parpol di Malaysia semakin agresif. Relasi antara parpol dengan TKI mendekati masa pemilu tidak selamanya membuat kampanye positif, namun realitanya terjadi kecurangan yang dilakukan parpol dengan TKI secara singkat.

Muhammad Hanif Dhakiri Menteri Ketenagakerjaan Indonesia berpendapat bahwa dalam penegakan konstitusional kehadiran parpol dianggap positif karena telah menjalankan fungsinya terlebih kepada WNI di Malaysia yang memiliki banyak konstituen dari kalangan TKI. Hanif mengatakan bahwa hakikat parpol itu mencari suara, dimana ada warga Indonesia di sana parpol beraktivitas, apabila terdapat WNI di luar negeri maka tetap parpol beraktivitas untuk menanamkan kepercayaan kepada mereka memang itu tugas parpol sebagai penegak konstitusi, dengan demikian tidak menjadi masalah untuk parpol beraktivitas keluar negeri (Dhakiri, 2018).

Slogan “Lemari kita adalah saku kita” terlontar dari ketua DPC LN PKS Kuala Lumpur di sela-sela penjelasan mengenai politik PKS di Malaysia. PKS mengatakan PKS luar negeri di luar Malaysia memberi bantuan dana untuk memenangkan PKS di Malaysia melihat banyaknya TKI sebagai konstituen parpol yang membutuhkan banyak dana pula. Ketua DPC LN PKS berkata:

“Ketua PKS dulu 2014 itu sempat nantangin temen-temen di luar Malaysia, di luar Indonesia di luar Malaysia ya dukung logistiknya ajalah, kasih ke kami nanti Malaysia bisa, ngerti gak? Karena kalo diitung kan pendanaan

juga ada istilah sunduquna juyubuna, ya kantong-kantong kita juga. Jadi waktu ada drop lah dari suntikan, jadi bisa bergerak lebih mobile lagi. Ya mudah-mudahan kali ini” (Buys Y. F., Wawancara, 2018).

Peran serta fungsi parpol di Malaysia dan di dalam negeri berbeda, sesuai konteksnya memang realitanya banyak hal yang di tangani KBRI di Malaysia tidak luput dari pengaruh parpol. Ketua DPC LN Gerindra telah memberi paparan tentang pemetaan fungsi parpol di Malaysia. Ketua DPC LC Gerindra mengatakan bahwa fungsi parpol di Malaysia ini untuk menjaga TKI, mengawal kedutaan, dan melakukan kerja-kerja yang patut dilakukan parpol (Muis D. B., Wawancara, 2018).

Sebagai negara hukum dengan sistem keimigrasian yang baik Malaysia mempunyai aturan ketat terhadap WNA yang berada di negaranya terlebih banyaknya TKI ilegal yang melanggar hukum negaranya. Sekjen DPC LN Demokrat mengatakan bahwa peraturan di Malaysia sesuai undang-undang negaranya, apabila terdapat lebih dari lima warga negara asing berkumpul harus memiliki izin dari kepolisian setempat, jikalau tidak memiliki izin maka mereka bisa dikasuskan (Hermanto, Wawancara, 2018). Hal itu ditegaskan Imam Wahyudi ketua Informasi Warga Jember IWJ yang mengatakan bahwa peraturan WNI di Malaysia tidak boleh sembarang mendirikan komunitas ataupun membawa nama parpol. Apabila terjadi pelanggaran seperti halnya perkumpulan apapun termasuk kumpul papol yang tidak mendapat izin resmi dari kepolisian setempat maka akibatnya bisa deportasi (Wahyudi I. , Wawancara, 2018).

Di sisi lain media sosial seperti whatsapp yang sudah didirikan oleh perusahaannya pada tahun 2009 baru dimanfaatkan aktif oleh KBRI untuk menjalin komunikasi dengan para elite parpol di Malaysia setelah 9 tahun berdiri. Mungkin keberadaan parpol waktu itu belum seperti sekarang dan hubungan parpol dengan KBRI juga belum seperti sekarang. Walaupun demikian perkumpulan seluruh parpol di Malaysia pada 15 April 2018 lalu telah menghasilkan banyak hal diantaranya terbentuknya grup whatsapp untuk memudahkan komunikasi antar parpol dan KBRI. Agung Cahaya Sumirat berkata KBRI membuat forum whatsapp antara PPLN dan parpol untuk melakukan komunikasi politik PPLN kepada parpol (Sumirat, 2018).

Adanya pemilu di Malaysia membuat hubungan parpol dengan KBRI semakin baik. Hal itu dapat diasumsikan bahwa jalannya perlindungan bagi TKI semakin mudah. Transparansi dalam komunikasi parpol dengan KBRI terbangun karena kebutuhan KBRI melalui PPLN yang menginginkan validasi pendataan pemilih serta suksesnya kelangsungan pemilu. Kedekatan parpol dengan KBRI dapat menjadi acuan baik untuk memperbaiki sistem dalam perlindungan TKI. Oleh karenanya fenomena aktivitas parpol terhadap TKI di Malaysia menguntungkan bagi TKI terlebih bagi TKI ilegal yang membutuhkan perlindungan.